



## Membicarakan sejarah kontroversial: historiografi, ingatan masyarakat dan pendidikan sejarah di Indonesia

## Talking about controversial history: historiography, public memory, and history education in Indonesia

Anung Jati Nugraha Mukti<sup>a</sup>, Johan Inda Permana<sup>b</sup>

*Anungjati98@mail.ugm.ac.id, johanperman0910@gmail.com*

<sup>a</sup>Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Caturtunggal, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, Indonesia

<sup>b</sup>Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Kota Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia

Corresponding email: *Anungjati98@mail.ugm.ac.id*

### ARTICLE INFO

Received: December 23, 2021

Revised: April 29, 2023

Accepted: May 01, 2023

Published: June 31, 2023

### Permalink/DOI

10.17977/um020v17i12023p105-122

Copyright © 2023.

Sejarah dan Budaya

Email: *jsb.journal@um.ac.id*

Print ISSN: 1979-9993

Online ISSN: 2503-1147

### How to Cite APA Style:

Mukti, A.J.N., & Permana, JI. (2023). Membicarakan sejarah kontroversial: historiografi, ingatan masyarakat dan pendidikan sejarah di Indonesia. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 17(1), 105-122. <https://dx.doi.org/10.17977/um020v17i12023p105-122>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

### ABSTRACT

This research aims to determine the history, memory, and historical education that are built-in historical discourse. History and memory are two components that influence and support each other. But what if the narrated history is different from the people's memory and how is this conveyed in education?. Answering the researcher's questions using the literature review method. In the last five years, major countries in the world have apologized and reconciled historical events that occurred in the past. The apology came after it emerged proving the victims as well as humanitarian considerations. In Indonesia, the events of 1965 and the Indonesian revolution have become the main discussion in the history of history to this day. Differences in historical narratives and people's memories of these events harm historical education. History will lose its soul and function because it is unable to achieve the goals achieved both in learning and in society.

### KEYWORDS

controversy; history; memory; historical education; historiography

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana sejarah, ingatan dan pendidikan sejarah dibangun dalam wacana sejarah kontroversial. Sejarah dan ingatan adalah dua komponen yang saling mempengaruhi dan saling menyokong. Namun bagaimana jika sejarah yang dinarasikan berbeda dengan ingatan masyarakat serta bagaimana hal tersebut disampaikan dalam pendidikan ?. Menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode kajian pustaka. Lima tahun terakhir negara-negara besar di dunia melakukan ucapan permintaan maaf dan rekonsiliasi peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu. Permintaan maaf tersebut terjadi setelah muncul kesaksian para korban serta pertimbangan kemanusiaan. Di Indonesia, peristiwa 65 dan revolusi Indonesia menjadi pembahasan utama dalam sejarah kontroversial hingga hari ini. Perbedaan narasi sejarah dan ingatan masyarakat tentang peristiwa tersebut memberikan dampak negatif dalam pendidikan sejarah. Sejarah akan kehilangan jiwanya dan fungsinya karena tidak mampu mencapai tujuan yang dicapai baik dalam pembelajaran maupun dalam masyarakat.

### KATA-KATA KUNCI

kontroversi; sejarah; ingatan; pendidikan sejarah; historiografi

## PENDAHULUAN

“Bangsa yang besar tidak hanya menghargai jasa para pahlawannya, namun juga mengakui kelalaian ataupun kesalahan yang pernah dilakukannya dan meminta maaf.” (Margana, 2021)

Pada beberapa tahun terakhir terjadi sebuah tindakan yang cukup mengejutkan di dunia Internasional. Tindakan tersebut adalah ketika pihak Belanda meminta maaf kepada Indonesia terkait kesalahan yang telah dilakukan pada masa lampau terhadap Indonesia (Tim detikcom, 2021). Kesalahan yang dimaksudkan adalah sistem komersial kolonial yang mengarah pada perbudakan dan perdagangan manusia. Meski permintaan maaf tersebut belum mencakup skala nasional Belanda yaitu hanya kota Amsterdam saja, tetapi permintaan maaf yang disampaikan oleh Wali Kota Amsterdam merupakan itikad baik yang dilakukan manusia sebagai bangsa yang besar. Sejatinnya permintaan maaf yang serupa pernah dilakukan oleh beberapa negara besar seperti negara Jepang meminta maaf kepada negara-negara yang pernah dirugikan terkait penjajahan dan peperangan. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang pada tahun 2015. Permintaan maaf tersebut sebagai bentuk tradisi dan kepedulian serta tanggung jawab Jepang terhadap korban-korban peristiwa pada masa lampau khususnya *Jugun Ianfu* di negara-negara bekas jajahan (Denny/Reuters, 2015). Selanjutnya pada tahun 2019 Belgia sebagai sebuah negara meminta maaf kepada Kongo. Permintaan maaf tersebut dilakukan oleh Perdana Menteri Belgia terkait kasus penculikan anak-anak dari ras campuran semasa era kolonial di Kongo (Daniel, 2019). Yang terakhir adalah permintaan maaf Jerman kepada Polandia pada tahun 2019. Presiden Jerman meminta maaf atas kejahatan Nazi di Polandia dan negara-negara lain di Eropa (Maestro et al., 2019). Permintaan maaf tersebut terkait kejahatan Nazi dan *Genosida* yang dilakukannya terhadap orang Yahudi Eropa (*Holocaust*) di wilayah kekuasaan Nazi pada sekitar tahun 1940-an.

Permintaan maaf oleh negara-negara besar pada beberapa dekade terakhir memang seperti sebuah *tren positif* dari suatu kegiatan bernegara. Permintaan maaf tersebut tentu bukan hanya muncul secara tiba-tiba, namun juga memiliki keterkaitan dengan kontroversi sejarah yang terjadi di dalamnya. Sejarah sebagai bentuk rekonstruksi peristiwa masa lalu seakan membayangkan dan mengajak untuk berpikir ulang tentang suatu peristiwa masa lampau yang pernah terjadi (Kuntowijoyo, 2013, p. 14). Dengan demikian sejarah mampu memberikan dorongan bagi pihak tertentu untuk melakukan sebuah tindakan yang lebih manusiawi, misalnya permintaan maaf yang dilakukan oleh negara-negara besar di dunia. Sejarah sebagai Pendidikan Moral, merupakan salah satu sub bab yang terdapat pada buku yang ditulis oleh Kuntowijoyo dengan penjelasan, sejarah mampu menjelaskan kepada para pembaca melalui tulisan-tulisan berdasarkan fakta dan mengajak untuk berfikir ulang dengan menanamkan pesan moral yang sebaiknya dilakukan di masa mendatang (Kuntowijoyo, 2013, pp. 20–21). Fenomena permintaan maaf tersebut merupakan rentetan dari berbagai peristiwa yang berkaitan dengan sejarah, seperti pergeseran penulisan sejarah atau kemunculan keterangan dari para pelaku sejarah melalui ingatan pengalamannya di masa lalu yang mempengaruhi langkah negara untuk meresponnya.

Sekitar abad ke-20 awal, para korban (ditempatkan sebagai pelaku sejarah) atau orang-orang yang selamat dari perang, mulai berani bersuara. Dunia Internasional mulai merespon para korban sebagai bukti kemanusiaan, sebagaimana dalam Surat Kabar Den

Haag yang menjelaskan bahwa dukungan dari korban perang oleh tentara Jerman (Nazi) telah berdatangan dari kelompok nasionalis dan sosialis yang kemudian berkumpul untuk membicarakan tentang dukungan tersebut ([Haagsche Courant, 1933](#)). Selain itu dalam Koran Trouw yang diterbitkan oleh Organisatie Trouw tahun 1975 pada bagian laporan Van Namen, menjelaskan bahwa korban perang harus menerima kompensasi yang lebih layak (tinggi) ([Trouw, 1975](#)). Hal tersebut membuktikan bahwa para korban dari peristiwa-peristiwa sejarah mulai berani tampil yang kemudian memberikan implikasinya pada sejarah. Para korban memberikan keterangan berdasarkan ingatan mereka dengan sudut pandang yang ternyata berbeda dari historiografi yang beredar. Historiografi adalah penulisan sejarah yang merupakan hasil produk dari cabang ilmu sejarah yang dihasilkan oleh para sejarawan yang disusun berdasarkan fakta yang tersedia ([Kuntowijoyo, 2013](#)). Maka kemunculan fakta baru tidak menutup kemungkinan untuk terbukanya sebuah pandangan baru. Kemunculan pandangan baru umumnya akan melahirkan sebuah rekonstruksi peristiwa sejarah yang bersifat kontroversial dikarenakan terjadi sebuah perbedaan yang bersifat *menyentak* tentang pandangan yang sudah ada sebelumnya.

Historiografi sebagai rekonstruksi sejarah, mulai bergeser yang mulanya hanya memiliki kecondongan pada orang-orang besar yang bersifat *makro* dan memiliki visi politik, berubah menjadi kecenderungan yang bersifat *mikro* yang memiliki visi lebih mengarah ke sosial. Bambang Purwanto dalam tulisannya menyoroti perubahan tersebut sebagai perubahan historiografi lama yang bersifat monologis yang hanya tertarik untuk menemukan visi politik secara tunggal dan penuh akan kepentingan mulai bergeser ke arah yang lebih ilmiah dan kritis serta merupakan produk keilmuan yang dilahirkan oleh para sejarawan ([Purwanto, 2001, pp. 30-31](#)). Pergeseran tersebut sangat didukung dengan tampilnya keterangan-keterangan dari para korban peristiwa sejarah di masa lampau untuk dituliskan, sehingga secara cepat atau lambat akan menggeser kecondongan sejarah yang masih bersifat politik menuju kecondongan yang bersifat sosial.

Fenomena-fenomena yang terjadi di negara-negara besar seperti permintaan maaf dan keberanian para korban untuk bersuara sepertinya belum terjadi secara sempurna di negara kita Indonesia. Terkait peristiwa 65 misalnya, peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang cukup kontroversial di Indonesia. Dikarenakan seiring berjalannya waktu pada periode pasca Orde Baru, mulai banyak muncul kesaksian-kesaksian oleh para korban dari peristiwa tersebut. Terlepas dari benar atau tidaknya peristiwa tersebut, atukah “siapa pelaku sebenarnya”, yang jelas ingatan masyarakat, historiografi yang beredar serta sejarah diajarkan dalam pendidikan sejarah sedang mengalami masa “kebingungan” yang berdampak pada pengetahuan masyarakat. Selain peristiwa 65 ada pula peristiwa Revolusi Indonesia yang disebut oleh para sejarawan masih diselimuti oleh bingkai politik militer. Selain itu periode yang lebih tua yaitu abad ke-19 hingga abad ke-20 juga masih memiliki banyak kontroversi seperti konsep modernitas yang hadir akibat kota kolonial.

Taufik Abdullah mengatakan bahwa salah satu hal yang menarik dalam diskusi sejarah adalah kesediaannya untuk sewaktu-waktu melakukan tinjauan terhadap dirinya ([Abdullah, 1997, pp. 41-43](#)). Maknanya adalah secara sewaktu-waktu sejarah mampu merevisi dirinya apabila ditemukan sumber temuan baru. Bukan hanya merevisi namun juga bisa jadi mampu merubah alur secara keseluruhan dari suatu narasi sejarah. Selain temuan

sumber sejarah baru sebagai bukti sejarah yang valid, interpretasi diperlukan oleh para sejarawan layaknya seorang dalang yang memainkan wayangnya. Michael Stanford dalam bukunya *The Nature of Historical Knowledge* menjelaskan tentang konsep sejarah secara rinci mulai dari bagaimana bukti ditemukan dan diidentifikasi menjadi fakta sejarah atau sumber sejarah yang valid, kemudian dinarasikan oleh para sejarawan dengan menggunakan metode sejarah dan berbagai pendekatan untuk menguraikannya (Stanford, 1987, pp. 86–93). Buku tersebut diambil sebagai kerangka pikir dari penelitian ini guna menguraikan historiografi serta ingatan masyarakat terhadap suatu peristiwa sejarah dan bagaimana sejarah tersebut diajarkan atau dikomunikasikan dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana sejarah kontroversial dalam pandangan historiografi, ingatan masyarakat serta dalam pengajaran pendidikan sejarah. Dengan demikian diperoleh judul Membicarakan Sejarah Kontroversial: Ingatan Masyarakat dan Pendidikan Sejarah. Sejauh ini peneliti belum menemukan suatu artikel ilmiah yang membahas hal tersebut secara terkait satu sama lain, dengan demikian peneliti mengharapkan, dengan adanya artikel ini, mampu memberikan pencerahan tentang kontroversi dalam historiografi sejarah yang disandingkan dengan ingatan masyarakat dan pendidikan sejarah. Untuk melakukan perincian dalam pembahasan peneliti memperoleh pertanyaan antara lain: Apa itu sejarah kontroversial, Bagaimana kaitan antara sejarah kontroversial dengan ingatan masyarakat, dan yang terakhir, Bagaimana posisi sejarah kontroversial dalam pendidikan sejarah.

Kajian mengenai mengenai historiografi sejarah yang bersifat kontroversial diketahui sudah banyak peneliti yang membahasnya, baik peneliti dalam negeri dan luar negeri. Peneliti dalam negeri yang diketahui adalah Bambang Purwanto dalam bukunya *Gagalnya Historiografi Indonesia Sentris ?!* yang kedua adalah buku dari Bambang Purwanto dan Asvi Warman Adam yaitu *Seabad Kontroversi Sejarah*. Peneliti memilih buku tersebut dikarenakan dalam dua buku tersebut disajikan bagaimana kritik-kritik tentang penulisan sejarah/historiografi di Indonesia yang beredar. Mulai dari militerisasi hingga historiografi sejarah yang bersifat legitimasi. Dimana hal tersebut merupakan hal kontradiktif dalam sejarah dikarenakan memuat misi politik yang memungkinkan bersifat subyektifitas bahkan mampu mengaburkan fakta asli (Adam, 2007; Purwanto & Adam, 2006). Peneliti luar negeri terkait pembahasan historiografi kontroversial diketahui adalah Joe Guldi dan David Armitage dalam bukunya *The History Manifesto*. Buku tersebut menjelaskan bagaimana sejarawan seharusnya bersikap dalam menyampaikan kebenaran sejarah di depan penguasa. Lebih spesifik buku ini menjelaskan mengenai pentingnya objektivitas dalam sejarah dengan berlandaskan kemanusiaan (Guldi & Armitage, 2014). Peneliti luar negeri selanjutnya adalah Hayden White dalam artikelnya *The Politics of Historical Interpretation*. Dalam artikel tersebut dijelaskan bagaimana historiografi tersusun berdasarkan interpretasi penulisnya. Gaya bahasa, latar belakang sejarawan dan haluan penulisan secara politik merupakan pembahasan yang disajikan dalam artikel tersebut. Hal ini berguna sebagai pisau analisis bagi peneliti untuk melihat dan membaca bagaimana sejarawan berpihak dalam historiografi kontroversial yang beredar (White, 1982).

Selanjutnya kajian mengenai ingatan masyarakat tentang peristiwa sejarah setidaknya diketahui Jay Winter dalam bukunya yang berjudul *Remembering War: The Great*

*War Between Memory and History in the Twentieth Century* dan Adam Timmins *Memory and History: Understanding Memory as Source and Subject*. Keduanya secara keseluruhan membahas hal yang sama yaitu bagaimana sejarah ditulis melalui ingatan masyarakat. Perbedaan dari keduanya yang mendasar adalah Jay Winter memberikan rincian tentang peristiwa perang ke II, dan membahas tentang ingatan-ingatan korban dan keluarga korban yang mengalami peristiwa tersebut. Tulisan ini seakan memberikan kecondongan yang berbeda dari sejarah yang beredar, yaitu dengan melakukan pendekatan yang lebih sosial dan humanis. Sedangkan tulisan dari Adam Timmins cenderung lebih teoritik bagaimana sejarawan mampu mengolah ingatan, dari para pelaku sejarah. Pembahasannya Timmins membedakan antara sejarah dan memori sebagai suatu fungsionalitas yang terkait dan menyokong satu sama lain, hingga mampu melahirkan historiografi yang bersifat nyata (Timmins, 2013; Winter, 2006).

Sejarah kontroversial dalam pendidikan, peneliti mengaji buku dari Tsabit Azinar Ahmad *Sejarah Kontroversial di Indonesia: Perspektif Pendidikan*. Dalam buku tersebut dijelaskan bagaimana posisi sejarah kontroversial di Indonesia diajarkan di sekolah-sekolah. Mulai dari dalam bentuk persiapan hingga penyampaian materi oleh guru (Ahmad, 2016). Selain itu peneliti juga menyandingkannya dengan tulisan dari Moh. Yamin *Menggugat Pendidikan Indonesia: Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara*. Dalam buku tersebut dijelaskan bagaimana paradigma pendidikan di Indonesia. Mulai dari definisi pendidikan dan upaya penyelamatan pendidikan. Berkaitan dengan pembahasan, dalam buku ini dijelaskan bagaimana permasalahan yang dialami oleh para pendidik terkait pendidikan di sekolah dengan kaitannya kepada penguasa (Yamin, 2020).

Beberapa tulisan yang telah disebutkan sebelumnya merupakan kajian yang mendalam namun terpisah. Maka peneliti berusaha menyajikan penelitian mengenai pembahasan-pembahasan tersebut sebagai suatu kesatuan yang terkait dan saling mempengaruhi. Dengan merujuk pada masing-masing tulisan yang memiliki kekhasan yang berbeda peneliti berusaha menampilkan sebuah diskusi mendalam dan ilmiah dari topik yang sudah dijelaskan sebelumnya.

## **METODE**

Penelitian mengenai Membicarakan Sejarah Kontroversi: Ingatan dan Pendidikan Sejarah di Indonesia ini menggunakan metode penelitian studi pustaka. Studi pustaka dinilai cocok digunakan dalam artikel ini karena peneliti mampu melakukan perbandingan antar buku dengan berfokus pada topik yang akan dibahas. Dengan membandingkan, peneliti mampu melihat bagaimana diskusi tentang sejarah kontroversial ini berlangsung dan bagaimana polanya. Metode studi pustaka sejatinya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bertumpu pada kajian literatur seperti, buku, majalah, leaflet, atau literatur lainnya baik cetak maupun digital (Danial & Wasriah, 2009, p. 80). Dalam penelitian studi pustaka, terdapat empat ciri yang perlu diperhatikan diantaranya adalah pertama, penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks; kedua, data pustaka bersifat siap pakai; ketiga, data pustaka umumnya sumber sekunder; keempat, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Zed, 2004, p. 3).

Penulisan artikel ini disusun dengan memanfaatkan koleksi Perpustakaan Daerah Kabupaten Tulungagung, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada baik sumber cetak maupun digital yang tersedia. Selain itu peneliti juga memanfaatkan buku-buku elektronik dari Google book, serta berbagai jurnal dan artikel ilmiah dari Google Scholar, Elsevier serta Jstor. Peneliti juga menggunakan Google sebagai mesin pencari untuk menemukan berbagai Web yang mampu menyajikan data primer sejarah secara baik dan bisa diakses misalnya Delpher ataupun yang lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ingatan Masyarakat dan Sejarah Kontroversial**

Beberapa tahun terakhir permintaan maaf oleh sebuah negara kepada para korban dari peristiwa masa lalu banyak muncul. Mulai dari Jepang yang meminta maaf kepada korban perang dan juga kaum *Jugun Ianfu*, Belgia, Jerman bahkan disusul Belanda pada tahun 2021 sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian latar belakang. Permintaan maaf tersebut bergerak seperti sebuah tren positif dalam menanggapi kemanusiaan dan merespon sejarah kelam di masa lalu. Secara fungsionalitas memang sejarah sangat penting dalam kaitannya dengan kemanusiaan dan moral, sebagaimana dikatakan oleh Bacon tentang sejarah mampu membuat manusia menjadi bijak. Karena sejarah berkaitan dengan perubahan manusia, bagaimana manusia bertindak dan belajar dari tindakan tersebut. Manusia tentunya tidak menginginkan untuk kembali melakukan kesalahan yang serupa di masa lalu, sedangkan keberhasilan yang telah terjadi di masa lalu merupakan suatu capaian yang sebaiknya dipelajari dan ditingkatkan kembali. Sejarah memposisikan sebagai objek untuk menalar bagaimana bertindak secara manusiawi dengan mempertimbangkan dampak-dampaknya (Wineburg, 2001). Sejarah seakan memetakan bagaimana kemungkinan yang terjadi di masa depan dengan merujuk pada kejadian masa kini. Sebagaimana dijelaskan oleh Ankersmit tentang bagaimana konsep sebab akibat dalam istilah yang dikenal dengan *Covering Law Model* (CLM). Dalam model CLM tersebut dijelaskan bagaimana sejarah mampu ditafsirkan, mulai dari Skema penalaran atau yang dikenal dengan *Modus Ponens*, dilanjutkan dengan mengonfirmasi fakta, menyambungkan sebab akibat terhadap peristiwa lain yang serupa, membuka jalan untuk menerangkan peristiwa, mendefinisikan pola hukum yang terjadi, kemudian mempertanyakan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi (Ankersmit, 1987, p. 125). Sejarah seakan memberikan gambaran dari konsekuensi yang diterima apabila melakukan sesuatu. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan negara-negara besar melakukan tindakan tersebut sebagai bentuk upaya belajar dari sejarah dan mulai memperhatikan masa depan yang lebih baik.

Sejarah sebagai bentuk upaya dari manusia untuk belajar dari kesalahan di masa lalu dan upaya memetakan masa depan dituntut untuk selalu objektif. Sejarah dituntut untuk menyajikan narasi yang bersifat objektif tanpa memihak haluan politik manapun, tentunya tuntutan ini ditekankan kepada para sejarawan sebagai sutradara dari penulisan sejarah. Sejarawan dituntut untuk menyajikan data yang bersifat objektif, bersumber pada bukti-fakta sejarah yang otentik dan tidak memihak sebagaimana sifat dari ilmu pengetahuan yaitu untuk menjelaskan dan memberikan pengetahuan (Harrison et al., 2004, pp. 26–30). Subjektivitas dan objektivitas dalam sejarah selalu menjadi problem yang dilematis bagi para

sejarawan, perdebatan mengenai hal ini terjadi hingga kini. Meski demikian arah penulisan dari hasil interpretasi para sejarawan merupakan suatu kemampuan terbatas yang bersifat bebas. Terbatas dalam kaidahnya menjadi manusia biasa yang tidak jauh dari kesalahan, bebas untuk menulis arah penulisan dengan merujuk pada bukti sejarah yang ditemukan tanpa terkekang oleh sesuatu apapun. Di Jerman dan di United Kingdom (Inggris) dijelaskan bahwa banyak historiografi pada abad ke-19 banyak historiografi yang menekankan pada perjuangan tatanan sosial dan politik. Hal ini menurut Robert Harrison dkk bukan suatu masalah, melainkan suatu kebutuhan dan keniscayaan dari seorang sejarawan. Hal tersebut dinilai sah-sah saja asalkan bertumpu pada bukti sejarah yang otentik sebagai sumber sejarah (Harrison et al., 2004, pp. 27–29).

Sumber sejarah yang digunakan oleh para sejarawan umumnya adalah dokumen tertulis, bukti tinggalan kebendaan (*artifact*) ataupun sumber lisan (Kuntowijoyo, 2013, p. 77). Umumnya sumber-sumber tersebut akan saling terkait dan saling menyokong. Meski demikian tidak jarang para sejarawan menemukan temuan baru yang menjadi sebuah paradigma baru dalam narasi sejarah. Temuan baru tersebut sifatnya akan mempengaruhi narasi sejarah yang telah tersusun dan beredar. Misalnya ingatan masyarakat dalam keterangan lisan mampu menjadi sumber sejarah yang otentik apabila sumber tersebut dinyatakan valid oleh para sejarawan.

Ingatan dan sejarah sejatinya saling menguatkan satu sama lain sebagaimana Amos Funkenstein menjelaskan bahwa ingatan kolektif merupakan kumpulan ingatan dari masyarakat yang mampu bertransformasi menjadi sejarah yang bersifat konsensus (Funkenstein, 1989). Meski demikian untuk memahami ingatan dan sejarah maka perlu dibedakan keduanya. Pembeda dari keduanya menurut Adam Timmins adalah “*history as that which happened, memory as that which is remembered of what happened*” (Timmins, 2013, pp. 3–4). Lebih jelasnya sejarah akan membahas tentang peristiwa yang terjadi, sedangkan ingatan membahas tentang apa yang diingat dari peristiwa yang terjadi. Keduanya seperti elemen yang saling menyokong dan tak terpisahkan, meskipun kadang sumber lisan berupa ingatan masyarakat seringkali disepelkan oleh para sejarawan.

Munculnya ingatan sebagai sumber lisan dari penulisan sejarah/historiografi terjadi cukup masif pada sekitar abad ke-20 awal. Di mana terjadi sebuah fenomena yang disebut dengan *Memory Boom* atau yang akrab disebut dengan istilah ledakan ingatan. Fenomena tersebut terjadi karena faktor yang bermacam-macam, namun menurut Adam Timmins yang paling berperan adalah pada peristiwa *Holocaust* dan korban-korban di dalamnya. Selaras dengan Adam Timmins, Jaw Winter juga menjelaskan bahwa para korban dari *Holocaust* mulai membuka mulut dan menceritakan bagaimana kesengsaraan yang dialami dari peristiwa tersebut. Dampaknya, dari peristiwa tersebut terjadi pergeseran studi sejarah yang lebih mengarah ke arah sosial. Ledakan memori mulai terjadi dengan sangat masif oleh para pelaku sejarahnya dan mulai membangkitkan para sejarawan untuk membuka pandangan baru dari sebuah narasi sejarah dan interpretasi sejarah. Mula-mula pembahasan perang dan peristiwa sejarah lainnya hanya membahas pihak-pihak tertentu dengan cara membangkitkan narasi dan objek material seperti monumen. Namun pada abad ke-20 penulisan bukan hanya tentang Jenderal, Laksamana, atau bahkan prajurit, namun mulai didominasi oleh masyarakat atau warga sipil (Winter, 2006, pp. 17–20 & 238–275).

Indonesia sempat mengalami paradigma yang hampir serupa sekitar pasca Orba tahun 1998. Tepatnya pada historiografi peristiwa 65 di mana terjadi kerusuhan yang luar biasa pada periode tersebut. Dalam kajian sejarah kerusuhan tersebut dikenal dengan peristiwa 30 September 1965. Sejatinya banyak penamaan dari peristiwa ini, setidaknya diketahui yang pertama adalah GESTOK (Gerakan Satu Oktober), kedua GESTAPU (Gerakan September Tiga Puluh) serta yang ketiga adalah *G.30.S*, istilah ini banyak dikenal oleh kaum militer dalam dokumen-dokumen kemiliteran. Istilah tersebut semakin berkembang dan mendapatkan imbuhan /PKI di dalam singkatannya, sehingga dikenal hingga kini sebagai *Gestok/PKI* atau yang paling akrab akhir-akhir ini *G-30-S/PKI* (Purwanto & Adam, 2006, pp. 227–229). Peristiwa kerusuhan yang cukup kelam tersebut mungkin layak disebut sebagai sebuah tragedi gelap dari Indonesia di masa lalu. Peristiwa yang terjadi secara sederhana sangat serupa dengan *Holocaust*, namun ini dalam skala yang lebih kecil. Lebih jelasnya apabila *Holocaust* terjadi pada masyarakat Yahudi, sedangkan ini terjadi pada masyarakat yang disebut-sebut bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Tragedi tersebut terjadi sebagaimana dituliskan dalam narasi historiografi sejarah di Indonesia terdapat sekelompok militer pimpinan dari Letkol Untung dan pasukan pengawal presiden yaitu Batalyon Cakrabirawa melakukan pembunuhan pada perwira Angkatan Darat yang disebut-sebut mendirikan Dewan Revolusi Indonesia. Pembunuhan tersebut dilakukan dalam rangka “melindungi” Presiden Sukarno. Tindakan tersebut berbuntut panjang hingga terjadi pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang yang diduga anggota dari PKI oleh orang-orang militer. Bambang Purwanto dan Asvi Warman Adam memandang tindakan ini sebagai bentuk kudeta, meski memiliki dalih melindungi dari kepala negara yang dipimpin oleh Letkol Untung (Purwanto & Adam, 2006, pp. 228–229).

Peristiwa 65 tersebut mulai menjadi paradigma dalam historiografi Indonesia ketika *Pasca Orde baru*, orang-orang yang disebut sebagai *korban* dari efek domino peristiwa 30 September 65 mulai angkat bicara. Mulai memberikan keterangan dan penjelasan mengenai apa yang dialaminya melalui ingatan yang mereka miliki berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Peristiwa tersebut juga dianggap sebagai historiografi yang bersifat politis. Menurut Asvi Warman Adam, peristiwa 65 ini merupakan peristiwa yang bersifat sangat politis dan cenderung bersifat tunggal dengan interpretasi sejarah yang diseragamkan (Adam, 2007, pp. 62–64; Purwanto & Adam, 2006, p. 230). Padahal historiografi harusnya bersifat dinamis, sebagaimana interpretasi sejarawan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu dalam memainkan narasinya menggunakan bukti-bukti sejarah yang otentik selama ilmiah hal tersebut merupakan hal yang sangat diharapkan dalam ilmu pengetahuan dan dianggap sebagai hal yang sah sebagai perbandingan serta pertimbangan bagi para pembaca untuk menilai (Stanford, 1987, pp. 77–95). Berkaitan dengan bukti sejarah yang bertentangan dengan narasi yang bersifat tunggal tersebut, sejatinya ada banyak sumber, sebagaimana peneliti pernah menemui ada seorang anak dari pemerintah elit lokal di suatu daerah yang bertemu dengan peneliti, menceritakan bagaimana dia kabur dari tugasnya untuk *membersihkan* orang-orang yang terduga PKI. Selain itu juga banyak dokumen-dokumen yang bentuknya video dokumenter dan yang paling dominan memang sumber lisan berupa keterangan dari para korban, yang tidak digubris ceritanya, bahkan masih menanggung dosa orang tuanya sebagai terduga, hingga kini.

Sejarah 65 menjadi sebuah paradigma dalam Historiografi di Indonesia. Kemunculan para korban yang berani bersuara menjadi *PR* tersendiri bagi para sejarawan dan pemerintah utamanya. Dengan adanya polemik dan paradigma tersebut sejarah 65 digolongkan dalam sejarah kontroversial. Hal ini karena terdapat polemik yang muncul dan sangat masif di dalamnya. Menanggapi hal tersebut sepertinya pemerintah Indonesia masih terlihat belum melakukan suatu tanggapan yang berarti. Permintaan maaf sepertinya belum terlihat hingga hari ini oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2015-2019 sempat terjadi sebuah wacana tentang permintaan maaf tersebut. Permintaan maaf tersebut sejatinya bukan meminta maaf untuk PKI namun untuk para korban tragedi di masa lalu yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM Berat. Namun hal tersebut hanya sebuah wacana yang hingga kini tidak pernah direalisasikan ([Affan & Lestari, 2015](#); [BBC News Indonesia, 2015](#)).

Sejatinya sejarah kontroversial di Indonesia bukan hanya sejarah 65 namun masih banyak yang lain semisal Revolusi Indonesia yang berkutat dengan narasi kemiliteran ataupun permasalahan pemahaman kolonialisme yang menimbulkan pertanyaan mengenai dampak positif ataupun negatif. Sejarah kontroversial merupakan polemik dalam historiografi yang seakan mempertanyakan kembali tentang, apa yang terjadi di masa lalu yang sebenarnya. Di sisi lain sejarah kontroversial seakan membuka pikiran pembaca mengenai mana narasi sejarah yang disuguhkan dengan fakta dan objektivitas serta narasi sejarah yang mana dibangun oleh niatan politik untuk memunculkan kaum tertentu.

### **Sejarah Kontroversial dalam Historiografi Indonesia**

Sejarah merupakan cabang ilmu sosial yang membahas tentang peristiwa masa lalu. Sejarah dinilai cukup unik, karena membahas peristiwa masa lalu yang sudah terjadi dan tidak mungkin terulang kembali. Keunikan sejarah juga mampu memberikan gambaran peristiwa masa lalu hingga menjadi tampak nyata dan logis bagi yang ingin mengetahuinya. Untuk menjelaskan suatu peristiwa masa lalu diperlukan suatu pisau analisis yang disebut dengan pendekatan. Umumnya sejarawanlah yang mampu menganalisis peristiwa tersebut dengan baik tentang, apa, bagaimana dan akibatnya. Michael Stanford menjelaskan bahwa sejarah selalu dapat dianalisis bagaimana pola yang berlaku dan bagaimana dampaknya yang bertumpu pada bukti-bukti sejarah yang umumnya mampu direkonstruksi oleh para sejarawan sebagai suatu narasi sejarah yang baik, logis dan ilmiah ([Stanford, 1987, pp. 88-97](#)). Secara definitif menurut Garraghan, sejarah sebagai cabang ilmu memiliki tiga konsep pengertian yaitu, pertama sebagai kejadian masa lalu yang bersifat faktual dan apa adanya, kedua sejarah sebagai cerita yang sifat dan kejadiannya sudah dipengaruhi oleh subyektifitas dari sang pencerita, ketiga sejarah sebagai disiplin ilmu yang mana sudah terdapat kritik dalam studi sejarahnya, pada bagian ini sejarah memiliki metode dan produk yang dimilikinya untuk disajikan secara ilmiah ([Garraghan, 1963, pp. 64-65](#)). Jadi dapat disimpulkan bahwa sejarah merupakan cabang ilmu sosial yang unik dan memiliki metodenya dan produknya dalam sumbangsuhnya kepada ilmu pengetahuan.

Metode sejarah sebagai metode yang dimiliki oleh ilmu sejarah merupakan kumpulan langkah-langkah untuk memahami dan menjelaskan suatu peristiwa masa lalu yang sudah terjadi untuk disajikan dengan ilmiah dan logis. Secara definisi menurut Louis Gottschalk metode sejarah terdiri dari empat kegiatan pokok yaitu, pertama mengumpulkan objek,

kedua menyingkirkan bahan yang tidak otentik, ketiga menyimpulkan kesaksian otentik, keempat menyusunnya menjadi kisah atau penyajian yang ilmiah (Gottschalk, 1969, pp. 24–26). Selaras dengan Gottschalk, sejarawan Indonesia yaitu Kuntowijoyo mendefinisikan metode sejarah sebagai empat tahapan yang serupa yaitu pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi dan penulisan. Namun secara menarik Kuntowijoyo menambahkan langkah pemilihan topik di awal langkah penelitian tersebut, guna memperinci langkah yang harus dilakukan ketika melakukan metode sejarah. Jadi ada lima tahapan, dengan diawali langkah pemilihan topik dan dilanjutkan dengan tahapan yang sudah dijelaskan sebelumnya (Kuntowijoyo, 2013). Untuk memahami metode sejarah maka terdapat metodologi guna menguraikannya, karena metodologi merupakan ilmu yang membicarakan langkah-langkah atau jalan yang dijelaskan dalam metode sejarah (Kuntowijoyo, 2013, p. xii). Metodologi adalah langkah awal yang dipelajari guna memahami bagaimana metode sejarah dijalankan sehingga menghasilkan produk berupa penulisan sejarah/historiografi yang ilmiah dan faktual.

Hasil dari metode sejarah yang telah dijelaskan sebelumnya adalah tulisan sejarah atau yang akrab disebut dengan Historiografi. Secara definisi Historiografi atau tulisan/penulisan sejarah adalah sebuah karya untuk menjelaskan tentang sejarah dengan beberapa indikasi tujuan dan sudut pandang penulis dengan menggunakan sumber-sumber sejarah yang tersedia (Becker, 1938, pp. 20–25). Historiografi pada awal kemunculannya selalu menceritakan tentang bagaimana orang-orang besar melakukan suatu tindakan yang besar pula, sehingga diharapkan orang-orang akan mengetahui dan mengenang jasa-jasanya. Historiografi seperti ini dianggap sebagai penulisan sejarah yang bermuatan politik atau disebut dengan *alat politik* (Kuntowijoyo, 2013, pp. 38–39). Hingga pada sekitar abad ke-19 historiografi mulai berkembang dan mengarah ke arah yang lebih sosial. Kemunculan mazhab *Annales* sebagai tonggak perubahan sejarah dunia yang dulunya hanya orang-orang besar dan bersifat politik, perlahan bergeser menjadi sejarah yang bersifat sosial. Sejarawan mulai memberikan kritik kepada historiografi klasik yang masih menggunakan narasi lama sebagai pembahasan utamanya, sebagaimana pembahasan para raja-raja dan tokoh-tokoh terkenal dan perannya. Kritik tersebut secara perlahan mulai menyadarkan para sejarawan dan memunculkan aliran sejarah baru yang disebut dengan *micro history*. Aliran ini dikenal sebagai aliran sejarah baru yang muncul pada abad ke-19 sebagai lanjutan dari kemunculan mazhab *Annales* di Prancis. *Micro history* merupakan historiografi dengan pembahasan yang lebih mengarah ke sosial, penamaan *micro* sendiri diambil dari lawan kata dari *macro* yang digambarkan sebagai *macro history* atau sejarah klasik yang penuh dengan visi politik (Iggers, 1997, pp. 41–101)

Di Indonesia perkembangan historiografi mengalami masa tonggak perubahan pada sekitar tahun 1957. Sejarawan akademik Sartono Kartodirdjo bisa dikatakan sebagai sejarawan yang mencetuskan pendekatan sejarah sosial bagi historiografi di Indonesia. Melalui seminar sejarah pertama di Yogyakarta tahun 1957 Sartono Mulai mengembangkan pemikirannya hingga terlahirlah historiografi sejarah sosial yang dinilai sebagai para sejarawan adalah pelopor sejarah sosial di Indonesia, yaitu disertasinya yang berjudul *Pemberontakan Petani Banten 1888* (Leirissa, 2001). Pendekatan ilmu sosial digunakan oleh Sartono sebagai *alat kupas* dalam penulisan peristiwa Geger Cilegon yang kemudian

dituangkan dalam disertasinya tersebut. Pendekatan ilmu sosial yang digunakan Sartono akrab disebut dengan pendekatan multidimensi, yang diharapkan mampu memahami dan menjelaskan peristiwa sejarah tersebut menjadi lebih bersifat sosial dan mudah dipahami, dan ternyata hasil akhir dari disertasi berupa historiografi tersebut sangat memuaskan dan menginspirasi para sejarawan hingga kini (Kartodirdjo, 2015, 2019, pp. 260–265).

Sejarah sosial di Indonesia setidaknya mulai dikenal pada tahun 1957 dan berlanjut pada setidaknya tahun 1966 dengan terbitnya disertasi dari sejarawan akademik Indonesia yaitu Sartono Kartodirdjo. Sebagai suatu bentuk definisi Sartono menjelaskan sejarah sosial adalah, suatu pembahasan sejarah yang berfokus pada sisi sosial di masyarakat secara terperinci dengan melihat proses-proses perubahan sosial yang terjadi di dalamnya. Sejarah sosial umumnya membahas orang-orang kecil seperti kaum petani, buruh, pedagang, pengusaha, kaum buruh atau bahkan kaum rakyat jelata (Kartodirdjo et al., 2017, pp. 2–5).

Sejarah sosial di Indonesia secara konseptual sama dengan sejarah sosial yang terjadi di dunia pada pembahasan sebelumnya. Tujuan dari kemunculannya juga serupa yaitu mereduksi dan merevisi ulang sejarah yang bersifat politis dan mengembalikan sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang murni dengan menjunjung tinggi objektivitas. Permasalahan yang sering menjadi sebuah perdebatan dari kalangan sejarawan adalah terkait sumber, dan interpretasi. Menurut Michael Stanford sumber sejarah mampu disusun menjadi rekonstruksi sejarah yang nyata apabila disandingkan dengan interpretasi sejarawan yang ilmiah dengan berbagai pendekatan (Stanford, 1987). Interpretasi merupakan salah satu hal pokok dari sejarawan yang harus dipahami dengan baik dalam menulis sejarah. Interpretasi kemungkinan sejarawan untuk menulis sejarah berdasarkan kepentingannya. Umumnya hal ini juga bersifat ilmiah namun seringkali para sejarawan berbeda pendapat dalam suatu peristiwa sejarah, dikarenakan perbedaan pemahaman dan pendekatan yang mereka lakukan, atau bahkan tentang perbedaan kepentingan, bisa saja kubu A menginginkan pesan politis dengan menggunakan bukti faktual dan mengaburkan bukti lain, sedangkan kubu B cenderung menginginkan pesan sosial dalam rangka kemanusiaan (White, 1982, pp. 114–119).

Perkembangan sejarah sosial di Indonesia menemukan banyak hambatan. Diantaranya adalah narasi nasional yang bersifat tunggal sehingga mampu mengesampingkan sejarah yang bersifat akademik. Yang berakibat banyak sejarah yang bersifat kontroversial yang beredar di Indonesia. Sejatinnya perbedaan dalam penulisan sejarah merupakan suatu keniscayaan dan umum terjadi dikarenakan perbedaan interpretasi dan bukti temuan oleh para sejarawan. Namun yang menjadi masalah apabila sejarah tersebut menjadi kontroversial akibat kesalahan dalam interpretasi yang entah disengaja ataupun tidak. Kesalahan tersebut bisa dikatakan disengaja karena telah mengaburkan beberapa sumber sejarah yang dinilai sah dan otentik sebagai suatu data penjelas dari peristiwa yang sedang dibahas karena penulisan sejarah yang sedang dilakukan sangat bermuatan politis dengan pesan-pesan politis pula. Paradigma kontroversial ini dijelaskan oleh Asvi Warman Adam sebagai kegagalan yang terjadi karena pemerintah sengaja menuliskan suatu peristiwa sejarah dengan tidak menjalankan fungsi interpretasi tepat, namun cenderung tidak lengkap dan tidak jelas yang berakibat bias dan

mbingungkan, karena tidak jarang narasi sejarah yang dituliskan tidak sesuai dengan data lapangan berupa sumber sejarah yang tersedia (Adam, 2006, p. 154).

Peristiwa 65 yang membekas bagi masyarakat Indonesia menjadi permasalahan tersendiri terkait historiografinya. Banyak diantara para korban kemanusiaan yang pada awalnya tidak berani bersuara dan setidaknya pada periode Pasca Orba mulai berani membuka mulut. Kesaksian tersebut hadir sebagai sudut pandang sejarah yang disebut dengan sejarah korban (Adam, 2007). Hal ini sangat serupa dengan yang terjadi di dunia sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Namun perbedaannya kesaksian tersebut cenderung tidak didengarkan bahkan kubu pemerintah seakan mendapatkan *plot armor* yang selalu benar. Sejatinya sejarah kontroversial senantiasa muncul dalam historiografi, namun yang menjadi permasalahan adalah apabila suatu narasi sejarah sengaja dibuat sebagai produk historiografi yang ternyata banyak mengandung kesalahan di dalamnya dan cenderung menyalahkan narasi lain yang tidak seragam dengannya. Dalam perkembangan historiografi sejarah Indonesia, paradigma yang sulit untuk diuraikan adalah pada bagian sejarah nasionalistis. Istilah tersebut dijelaskan oleh Sartono Kartodirdjo sebagai sudut pandang sejarah yang menceritakan kehebatan masa lalu yang gemilang dan terlalu mendewakan para tokohnya seakan menjadi sebuah pahlawan tunggal dalam suatu peristiwa dan berdampak sangat besar bagi nasional (Kartodirdjo, 2014, pp. 56-58). Kesulitan tersebut terdapat pada sebuah alasan yang didengungkan guna mempertahankan negara, dengan mengesampingkan fungsi ilmu pengetahuan harus bersifat ilmiah dan faktual.

*History Manifesto* yang merupakan buku karya dari Jo Guldi dan David Armitage muncul pada tahun 2014 merupakan suatu produk dari filsafat sejarah yang cukup menarik untuk dibahas. Dalam buku tersebut Jo Guldi dan David Armitage menjelaskan bagaimana tradisi keterlibatan publik oleh ilmu-ilmu sosial termasuk sejarah adalah sesuatu yang perlu diangkat, karena bisa jadi di dunia terdapat kontrak yang rusak dari hubungan manusia dan ilmu kemanusiaan dalam sejarah. Jo Guldi dan David Armitage bersikeras bahwa sejarah merupakan cabang ilmu yang harus dipertimbangkan guna memikirkan sebuah kebijakan oleh pemerintah, tentang langkah apa yang sebaiknya ditempuh untuk menanggapi suatu permasalahan dengan berdasarkan kemanusiaan. Kebijakan diambil berdasarkan kemanusiaan yang diperoleh dari pertimbangan ilmu sejarah sudah seharusnya tidak melupakan bahwa sejarah adalah cabang ilmu pengetahuan yang mengedepankan visi umum dari pada visi politik yang bersifat individualistis dan selalu menjunjung tinggi keilmiahan sebagaimana prinsip ilmu pengetahuan (Guldi & Armitage, 2014, pp. 1-38). Dalam kasus di Indonesia sebagaimana yang diusulkan dalam buku ini, bahwa pemerintah sebaiknya meninjau ulang bagaimana kebijakan-kebijakan dilakukan yang bertumpu pada ilmu sejarah dan kemanusiaan, di atas kepentingan politik. Karena sejarah adalah cabang ilmu yang mampu memprediksi masa depan dengan mempelajari masa lalu dengan baik sebagaimana prinsip kausalitas atau sebab dan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan (Guldi & Armitage, 2014; Kuntowijoyo, 1987; Purwanto, 2020, pp. 15-17).

## Sejarah Kontroversial dalam Pendidikan

Sejarah kontroversial adalah suatu keniscayaan dalam historiografi sejarah, sebagaimana perbedaan penggunaan sumber serta interpretasi sejarawan yang berbeda-beda. Lantas, bagaimana sejarah yang bersifat kontroversial tersebut mampu diajarkan dalam pendidikan di sekolah sedangkan terjadi perbedaan atau bahkan distorsi dalam ingatan masyarakat dan historiografi yang beredar? Di Indonesia penulisan sejarah modern dikenal dua jenis historiografi, yang pertama adalah historiografi akademik dan yang kedua adalah historiografi nasional atau yang lebih tepatnya Sartono Kartodirdjo menyebutnya dengan historiografi nasionalistik. Keduanya memiliki perbedaan yang mencolok, meski memiliki tujuan yang sama yaitu membangun bangsa melalui pengetahuan. Perbedaannya terletak pada bagaimana tulisan tersebut disajikan, historiografi akademik lebih mengarah kepada mengajak berfikir kritis, logis dan analitis terkait peristiwa masa lalu, sedangkan historiografi nasionalistis lebih dekat ke arah chauvinistis yang dikaitkan dengan mitos dari warisan historiografi tradisional. Sartono Kartodirdjo memberikan kritik pada historiografi nasionalistis yang cenderung membangun suatu *mindset nation* dengan mengedepankan mitos-mitos lama dan cenderung melupakan fakta-fakta sejarah yang bersifat nyata, logis dan kritis, padahal *mindset nation* akan mampu dilahirkan dengan nyata dan seakan berjiwa apabila memperhatikan prinsip sejarah sebagai ilmu dengan baik (Kartodirdjo, 2014, pp. 56–58).

Alasan dari *mindset nation* tersebut senantiasa dipertahankan dalam bingkai historiografi nasionalistik hingga hari ini sebagai upaya yang disebut untuk membangun bangsa. Pada akhirnya narasi tersebut akan dikategorikan dalam kategori sejarah kontroversial dikarenakan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada penjelasannya. Meski demikian narasi dari historiografi tersebut masih dipertahankan bahkan sampai ke dunia pendidikan. Isu pemalsuan sejarah, kebohongan sejarah, atau rekayasa sejarah seakan menghantui bagi para pendidik maupun siswa. Michael Stanford menjelaskan bahwa sejarah merupakan pembelajaran dari masa lalu yang harus direfleksi dengan baik sebagai sebuah pelajaran hidup di masa depan. Untuk memahaminya sejarah harus disampaikan kepada publik, yaitu dengan dua jalan, formal maupun informal. Cara informal melalui melakukan publikasi buku-buku historiografi kepada masyarakat, sedangkan cara formal adalah melalui pendidikan, cara ini dinilai paling efektif terkait sejarah sebagai pendidikan maupun popularitas (Stanford, 1987, pp. 147–166). Yang menjadi persoalan hingga hari ini adalah narasi yang bermasalah tetap diberlakukan sebagai narasi resmi yang bersifat tunggal, dengan demikian apabila melihat dari penjelasan Michael Stanford sejarah tidak akan menjadi sebuah pelajaran yang mampu direfleksi, karena hanya akan melahirkan kebingungan atau bahkan kebencian bagi kelompok tertentu.

Hingga hari ini permasalahan narasi sejarah dalam pendidikan sejarah masih menjadi persoalan bersama bagi para sejarawan pendidik maupun sejarawan akademik. Akibatnya sejarah hanya akan menjadi sebuah kronologi belaka yang tidak memiliki jiwa memberikan pengalaman bagi siswa sebagai siswa di sekolah (Widodo, 2011, pp. 243–245). Hal ini sekaligus menjadi kritik dan jawaban dari pembelajaran sejarah di Indonesia yang selalu dinilai tidak menarik dan membosankan. Meski demikian pembelajaran sejarah kontroversial oleh para pendidik harus tetap dilakukan, meskipun banyak terjadi

penyimpangan bahkan kebingungan. Karena pembelajaran sejarah kontroversial bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan serangkaian kompetensi siswa dalam berpikir kritis, logis dan humanis (Ahmad, 2016, pp. 54–55).

Hambatan utama bagi para pendidik sejarah dalam pembelajaran sejarah kontroversial adalah tentang kompetensi dan sumber daya materi yang tersedia. Hal tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bagi para pendidik sejarah. Para pendidik haruslah dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga siswa mampu memahami peristiwa sejarah secara kontekstual dikarenakan secara tekstual telah tersaji narasi sejarah yang cenderung bermasalah. Sebaiknya pendidik sejarah harus memiliki strategi yang cukup jitu untuk membangkitkan dan memainkan pola pikir siswa menjadi lebih kritis dan logis, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami materi yang bersifat kontekstual tersebut. Ahmad menjelaskan bahwa sebaiknya strategi yang digunakan oleh para pendidik sejarah adalah perspektif *critical pedagogy*, yang diarahkan pada konsep *political clarity* sehingga mampu mengajak siswa untuk memahami bagaimana kepentingan-kepentingan politik yang terjadi pada peristiwa sejarah tersebut. Strategi selanjutnya adalah penggunaan konsep *cultural competence*, guna memancing pemahaman siswa terhadap dimensi kebudayaan dari peristiwa tersebut yang kemudian ditetapkan sebagai hubungan individual maupun lingkungan sosial-kultural (Ahmad, 2016, pp. 208–210).

Kadang hambatan lain bagi para pendidik sejarah adalah masalah mental. Dikarenakan pembahasan yang dinilai cukup sensitif, tidak jarang para pendidik mengurungkan niat untuk membahas peristiwa sejarah kontroversial secara lebih kontekstual. Selain masalah mental adalah ketersediaan materi, dimana materi sejarah yang disajikan oleh Kurikulum di Indonesia mengacu pada satu sudut pandang saja, di mana tersebut tersedia dalam buku paket sejarah. Hal itu mengakibatkan para pendidik untuk berpikir ulang untuk mengajarkan sejarah dikarenakan permasalahan jawaban secara konsensus apabila terdapat soal yang membahas peristiwa tersebut di ujian. Selain itu bahaya dibalik pemakaian narasi tunggal dari buku paket akan menciptakan batasan-batasan yang cenderung mengembangkan ide yang salah apabila tidak diimbangi dengan buku lain sebagai materi pendukung untuk memberikan perbandingan (Kochhar, 2008)

Sejarah yang bersifat kontroversial banyak terdapat pada materi sejarah di dunia pendidikan. Mulai dari isu penjajahan, hingga masalah peristiwa 65 yang hingga kini masih menjadi persoalan yang nyata bagi negara. Pendidikan semacam ini dalam pengajaran sejarah akan melahirkan permasalahan baru yaitu dapat meminimalkan pemahaman siswa tentang *self-knowledge* dan *self-understanding* (Arta, 2012, pp. 163–166). Hampir serupa penjelasan sebelumnya siswa mulanya akan merasa bosan dan berlanjut bermasalahnya pola pikir siswa dalam memahami peristiwa sejarah tersebut karena kerancuannya.

Permasalahan mengenai pendidikan sejarah sejatinya bukan permasalahan para pendidik sejarah saja, namun juga para sejarawan dan kita sebagai masyarakat Indonesia. Melek sejarah dan bersifat bijaksana adalah salah satu jalan untuk memahami persoalan ini. Karena permasalahan ini akan saling terhubung, mulai dari penulisan sejarah yang rancu, berlanjut pada pemahaman siswa dan masyarakat yang bermasalah, hingga berakhir

tindakan yang salah karena tidak memahami sejarah dengan baik sebagai akibat dari penulisan yang kurang baik pula.

Pendidikan di Indonesia, khususnya pada pembelajaran dan pengajaran sejarah sedang mengalami masalah yang serius. Mulai dari penulisan pada peristiwa sejarah yang diajarkan di sekolah, hingga problematika pemahaman dari siswa seakan menjadi efek *domino* dari permasalahan awal yang terjadi. Reorientasi kurikulum bisa jadi salah satu langkah yang tepat bagi permasalahan ini. Menyusun dan menyesuaikan ulang dengan penyesuaian yang tepat akan meningkatkan gairah belajar dan pesan-pesan moral yang terdapat pada pembelajaran sejarah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah masalah pendidik sejarah yang seakan mengalami kekangan untuk mematuhi suatu peraturan yang berlaku dengan meninggalkan prinsip kritis dan logis dalam pendidikan. Maka hal ini berakibat pendidikan tidak lagi membebaskan, pendidik tidak akan mampu pula merangsang siswa untuk membebaskan daya pikir mereka. Sehingga tujuan pembelajaran sejarah secara nyata dalam membentuk kesadaran berbangsa atau membangun pemikiran yang kritis, logis, ilmiah dan bijaksana akan hanya menjadi sebuah wacana dalam pendidikan Indonesia (Yamin, 2020, pp. 151–157).

## **KESIMPULAN**

Sejarah dan ingatan adalah dua komponen yang berbeda namun saling mempengaruhi. Sejarah memainkan penjelasan mengenai sesuatu yang terjadi, sedangkan ingatan adalah tentang apa yang diingat dari suatu peristiwa yang terjadi. Meski demikian tidak jarang ingatan akan bertentangan dengan sejarah. Terkadang sejarah ditulis dengan narasi berbau kemenangan oleh suatu pihak tertentu, tanpa melihat aspek lain seperti korban dari peristiwa tersebut. Setidaknya pada lima tahun terakhir banyak negara-negara besar yang mulai meminta maaf terhadap sejarah yang kelam di masa lalu. Hal tersebut bermula karena munculnya keterangan para korban yang mulai bersedia membuka mulut untuk memberikan keterangan. Permintaan maaf dan rekonsiliasi adalah respon yang sangat baik untuk membuka kran hubungan baik antara kedua pihak yang sedang bermasalah.

Historiografi di Indonesia berkembang pesat pada sekitar tahun 1950-an. Yang kemudian dilanjutkan dengan tonggak kemunculan narasi sejarah yang baru dalam historiografi yang disebut dengan sejarah sosial. Di dunia sejarah sosial muncul di Perancis sebagai mazhab *Annales* yang kemudian berkembang penyebutannya menjadi lebih luas yaitu *micro history*. Di Indonesia sejarah sosial muncul pertama kali melalui disertasi dari Sartono Kartodirdjo yang menjelaskan peristiwa geger Cilegon dengan pendekatan ilmu sosial. Hal ini dinilai sebagai tonggak perubahan historiografi di Indonesia yang dulunya masih bersifat nasionalistik menjadi ke arah sosial. Sejarah kontroversial dalam tinjauan historiografi merupakan sebuah keniscayaan pada dasarnya. Bahkan banyak peneliti di dunia yang memakluminya karena permasalahan interpretasi yang berbeda dan sumber sejarah yang berbeda pula. Namun kontroversi sejarah dinyatakan sebagai suatu masalah besar apabila kesalahan interpretasi cenderung diseragamkan dan menjadikan seolah narasi tertentu merupakan kebenaran yang mutlak. Sejarah tidak lagi ilmiah, logis dan analitis, namun cenderung mengkerdikan, menimbulkan kebencian dan kebingungan.

Sejarah kontroversial dalam dunia pendidikan tentang wacana tunggal adalah permasalahan yang nyata. Sejarah dinilai oleh Michael Stanford akan sangat baik dikenalkan dalam dunia pendidikan, karena banyak mengandung pesan moral. Namun pada kenyataannya sejarah di Indonesia pada buku paket dengan bab pembahasan seperti peristiwa 65 atau Revolusi Indonesia cenderung memiliki narasi yang bersifat tunggal. Hal ini berdampak buruk bagi pemahaman siswa. Mulai dari kebingungan, bahkan salah paham mengenai suatu materi. Permasalahan lain adalah pendidik sejarah dituntut untuk membangun suasana kritis dan analitis dalam pembelajaran sejarah, namun nyatanya guru tidak mampu melakukannya karena terhalang banyak faktor, mulai dari ketersediaan materi, kompetensi pribadi, hingga ketakutan yang menghantui apabila terjadi salah penyampaian dalam materi-materi yang sifatnya kontroversial. Berkaca dari hal tersebut, pendidikan Indonesia sedang dalam fase yang tidak baik-baik saja, terlebih pada pembelajaran sejarah.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Abdullah, T. (1997). Ke arah penulisan sejarah pemikiran Islam di Asia Tenggara: sebuah pelancongan bibliografis. In *Sejarah Indonesia: penilaian kembali karya utama sejarawan asing*. Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lembaga Penelitian, Universitas Indonesia.
- Adam, A. W. (2006). *Soeharto file: sisi gelap sejarah indonesia*. Ombak.
- Adam, A. W. (2007). *Seabad kontroversi sejarah*. Ombak.
- Affan, H., & Lestari, S. (2015, September 28). *Komnas HAM: presiden minta maaf kepada korban, bukan kepada PKI*. *BBC News Indonesia*. BBC News Indonesia. [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/09/150921\\_indonesia\\_lapsus\\_kasus65\\_komnasham](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150921_indonesia_lapsus_kasus65_komnasham)
- Ahmad, T. A. (2016). *Sejarah kontroversial di Indonesia: perspektif pendidikan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ankersmit, F. R. (1987). *Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-Pendapat Modern tentang filsafat sejarah* (Terjemah D). Gramedia.
- Arta, K. S. (2012). Kurikulum dan kontroversi buku teks dalam KTSP. *Media Komunikasi FPIPS, 11(2)*, 153–168. <http://dx.doi.org/10.23887/mkfis.v11i2.459>
- BBC News Indonesia. (2015, September 28). *Eks tapol 1965: lima puluh tahun menanti keadilan..* *BBC News Indonesia*. [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/09/150925\\_indonesia\\_lapsus\\_ekstapol\\_rehabilitasi](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150925_indonesia_lapsus_ekstapol_rehabilitasi)
- Becker, C. (1938). What is historiography?. *The American Historical Review, 44(1)*, 20–28. <https://doi.org/10.2307/1840848>
- Danial, E., & Wasriah, N. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Daniel, B. (2019, April 3). *Belgium to apologize for kidnapping of children from Congo*. *TheGuardian.Com*. <https://www.theguardian.com/world/2019/apr/03/belgium-apologise-kidnapping-mixed-race-children-from-congo>

- Denny/Reuters, A. (2015, August 14). Shinzo Abe minta maaf atas kekejaman Jepang di perang dunia. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150814223353-11372316/shinzo-abe-minta-maaf-atas-kekejaman-jepang-di-perang-dunia>
- Funkenstein, A. (1989). Collective memory and historical consciousness. *History and Memory*, 1(1), 5–26.
- Garraghan, G. (1963). *A Guide to Historical Methods*. Fordham University Press.
- Gottschalk, L. (1969). *Understanding history : a Primer of Historical Method*. Alfred A. Knoff.
- Guldi, J., & Armitage, D. (2014). *The History Manifesto*. Cambridge University Press.
- Haagsche Courant. (1933, May 8). *Steun aan oorlogsslachtoffers*.
- Harrison, R., Jones, A., & Lambert, P. (2004). Scientific history and the problem of objectivity. In *Making History: An Introduction to the History and Practices of a Dicine*. Routledge.
- Iggers, G. G. (1997). *Historiography in the Twentieth Century: from scientific objectivity to the postmodern challenge*. Wesleyan University Press.
- Kartodirdjo, S. (2014). *Pemikiran dan perkembangan historiografi Indonesia*. Ombak.
- Kartodirdjo, S. (2015). *Pemberontakan petani Banten 1888*. Komunitas Bambu.
- Kartodirdjo, S. (2019). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Ombak.
- Kartodirdjo, S., Kuntowijoyo, K., Purwanto, B., & Nursam, M. (2017). *Sejarah sosial: konseptualisasi, model dan tantangannya*. Ombak.
- Kochar, S. K. (2008). *Pembelajaran sejarah*. Grasindo.
- Kuntowijoyo, K. (1987). Religion, state and social formation in indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 15(1), 1–15.
- Kuntowijoyo, K. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Leirissa, L. (2001). *Sejarah dan Demokrasi*. Makalah dalam Konferensi Nasional Sejarah Indonesia VII.
- Maestro, P. L., Woodyatt, A., Mendonca, D., & Crawford, J. (2019, September 1). *World War II: German President asks for forgiveness 80 years on - CNN*. CNN. <https://edition.cnn.com/2019/09/01/europe/germany-poland-ww2-forgiveness-grm-intl/index.html>
- Margana, S. (2021). *Historiography lecture UGM*.
- Purwanto, B. (2001). Historisisme baru dan kesadaran dekonstruktif: kajian kritis terhadap historiografi indonesiasentris. *Humaniora*, 13(1), 29–44.
- Purwanto, B. (2020). Mengapa Indonesia memerlukan ilmu sejarah? Beberapa gagasan untuk 'hilirisasi' historiografi. *Bakti Budaya*, 3(1), 4.
- Purwanto, B., & Adam, A. W. (2006). *Gagalnya historiografi indonesiasentris ?*. Ombak.
- Stanford, M. (1987). *The nature of historical knowledge* (1st edition). Wiley-Blackwell.
- Tim detikcom. (2021, July 3). *Amsterdam Jadi Kota Pertama di Belanda yang Minta Maaf ke Indonesia*. DetikNews. <https://news.detik.com/internasional/d5629245/amsterdam-jadi-kota-pertama-di-belanda-yang-minta-maaf-ke-indonesia>

- Timmins, A. (2013). Memory and history: Understanding memory as source and subject. In J. Tumblety (Ed.), *Reviews in History Published on Reviews in History* (pp. 1–230). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203552490>
- Trouw, T. (1975, september 11). Belangrijkste conclusie in rapport Van Namen: “Oorlogsslachtoffers moeten hogere uitkeringen krijgen”. *Organisatie Trouw*.
- White, H. (1982). The politics of historical interpretation: discipline and de-sublimation. *Critical Inquiry*, 9(1), 113–137. <http://www.jstor.org/stable/1343276>.
- Widodo, T. (2011). Memahami makna praksis pelaksanaan pembelajaran sejarah kontroversial. *Paramita: Historical Studies Journal*, 21(2).
- Wineburg, S. (2001). *Historical thinking and other unnatural acts: charting the future of teaching the past*. Temple University Press, Philadelphia 19122.
- Winter, J. (2006). *Remembering war: the great war between memory and history in the Twentieth Century*. Yale University Press.
- Yamin, Moh. (2020). *Menggugat pendidikan Indonesia: belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara*. Ar Ruzz Media.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.